



Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Pajak: Studi Kualitatif Kabupaten Polewali Mandar

Meliana¹, Ni Made Sintya Surya Dewi^{2*}

¹Universitas Terbuka

²Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Corresponding author, e-mail: sintyasuryadewi@unmas.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax Education, Polewali Mandar Regency, Tax Compliance, Tax Reporting, UMKM

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11414>

How to cite:

Meliana & Dewi, N. M. S. S. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kualitatif Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3(1), 31-37. <https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11414>

Published by:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of MSME Taxpayers in tax reporting in Polewali Mandar Regency. The main focus of this study is to understand the factors that influence tax reporting compliance among MSME actors, including taxpayer understanding, awareness of tax regulations, and support from local governments. Lack of knowledge and limited resources are often the main obstacles to proper tax reporting. This study recommends a tax education program for MSMEs, simplification of reporting procedures, and improvement of MSME-friendly tax service facilities to improve compliance. With this support, it is hoped that MSME Taxpayer compliance in Polewali Mandar Regency can increase significantly, encouraging regional economic growth through optimal tax contributions.



© 2025 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Kepatuhan dalam pelaporan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara serta kestabilan ekonomi daerah (Wardana, 2019). Meskipun UMKM memiliki potensi besar untuk mendukung pendapatan negara, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam kelompok ini masih menjadi tantangan di banyak wilayah, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Faktor-faktor seperti pemahaman terbatas terhadap peraturan perpajakan, persepsi tentang manfaat pajak, dan keterbatasan infrastruktur sering kali mempengaruhi perilaku kepatuhan UMKM dalam pelaporan pajak (Yulianto & Pratama, 2020; Sari & Kurnia, 2021).

Pentingnya pemahaman dan edukasi perpajakan bagi UMKM tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan, tetapi juga untuk memperkuat kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa program edukasi pajak yang tepat dapat membantu Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban mereka serta mendorong kepatuhan yang lebih tinggi (Handayani, 2022; Fitri & Rizki, 2023). Namun, di Kabupaten Polewali Mandar masih terdapat tantangan dalam penyampaian edukasi ini secara efektif, khususnya untuk UMKM yang mungkin memiliki keterbatasan dalam akses informasi.

Selain edukasi, sistem dan prosedur pelaporan yang sederhana dan mudah diakses juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menyarankan bahwa prosedur yang kompleks dan tidak ramah bagi UMKM dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Kusuma, 2023). Oleh karena itu, penyederhanaan sistem pelaporan pajak menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan penerimaan pajak serta pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal (Wibowo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan pajak di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan memahami kendala dan kebutuhan spesifik dari UMKM di wilayah ini, diharapkan dapat diberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan, melalui peningkatan edukasi pajak dan penyederhanaan prosedur pelaporan. Kepatuhan pajak pada sektor UMKM merupakan isu yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian oleh Wardana (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM umumnya rendah karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Menurut Yulianto dan Pratama (2020), UMKM sering kali mengalami kendala dalam pelaporan pajak yang disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi perpajakan dan dukungan infrastruktur yang memadai. Edukasi pajak dianggap sebagai solusi penting untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak UMKM. Edukasi pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM (Sari & Kurnia, 2021). Handayani (2022) menyatakan bahwa edukasi yang komprehensif dapat membantu wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perpajakan. Melalui edukasi yang efektif, wajib pajak tidak hanya mengetahui prosedur pelaporan yang benar tetapi juga memahami manfaat kontribusi pajak mereka bagi pembangunan nasional. Kompleksitas prosedur perpajakan sering kali menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam melaporkan pajak mereka secara tepat waktu. Kusuma (2023) menemukan bahwa prosedur yang panjang dan rumit dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak pada UMKM, khususnya di daerah terpencil. Penelitian lainnya oleh Wibowo (2021) menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur, seperti melalui penggunaan teknologi digital, dapat membantu UMKM melaporkan pajak mereka dengan lebih efisien dan akurat, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan pajak yang memadai berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Menurut penelitian Fitri dan Rizki (2023), fasilitas yang baik, seperti akses yang mudah ke layanan perpajakan berbasis digital, dapat membantu mengurangi beban administratif bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan Kusuma (2023), yang menyarankan bahwa pemerintah perlu menyediakan sarana yang ramah UMKM untuk mendukung pelaporan pajak yang lebih efektif. Dukungan pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan pajak di kalangan UMKM (Yulianto & Pratama, 2020). Kebijakan daerah yang proaktif, seperti program pembinaan dan pendampingan, terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Fitriani (2021) menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan UMKM dalam hal edukasi dan penyederhanaan prosedur pelaporan dapat berkontribusi pada pencapaian penerimaan pajak yang lebih optimal di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan pajak di Kabupaten Polewali Mandar. Objek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar. Fokus penelitian diarahkan pada tingkat kepatuhan UMKM dalam melaporkan pajak, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, serta hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen perpajakan, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan UMKM, serta statistik dan data kebijakan perpajakan di tingkat daerah yang mempengaruhi UMKM. Selain itu, literatur akademik yang relevan juga digunakan untuk memperkuat kerangka analisis terkait faktor-faktor kepatuhan pajak UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Studi ini mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi perpajakan, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, kebijakan pajak

pemerintah daerah, serta literatur yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM. Studi dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data historis dan statistik yang relevan dengan konteks UMKM di Polewali Mandar. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik. Data yang diperoleh dari studi dokumentasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, faktor penghambat dalam pelaporan pajak, serta upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan. Teknik ini memungkinkan pengidentifikasian pola yang menunjukkan hubungan antara kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM dalam konteks lokal di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar masih bervariasi, dengan sebagian wajib pajak belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pelaporan pajak. Menurut Wardani (2022), kepatuhan pajak pada sektor UMKM dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pajak, kejelasan prosedur, serta dukungan pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi perpajakan. Di Polewali Mandar, beberapa UMKM menyatakan bahwa mereka masih merasa terbebani dengan proses pelaporan pajak yang dianggap rumit, sementara UMKM lainnya mampu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur perpajakan dan kompleksitas dalam pengisian laporan pajak. Setiawan dan Putra (2021) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Di Kabupaten Polewali Mandar, UMKM sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan bimbingan terkait pengisian laporan pajak, yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan. Wibowo (2019) menyarankan bahwa peningkatan edukasi dan bimbingan dari pemerintah dapat membantu mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap perpajakan.

Pemerintah daerah di Polewali Mandar telah berupaya meningkatkan kepatuhan UMKM melalui berbagai program sosialisasi dan penyuluhan pajak. Menurut Nasution dan Harmani (2023), sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan pajak dan memperkuat pemahaman mereka terhadap prosedur yang harus diikuti. Meskipun upaya ini telah dilakukan, namun pelaksanaannya masih terbatas pada wilayah tertentu, sehingga belum menjangkau seluruh UMKM di Polewali Mandar.

Untuk mendukung pelaporan pajak yang lebih mudah dan akurat, pemerintah mulai menerapkan teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan. Fitriani (2021) menekankan bahwa teknologi informasi dapat mempermudah akses dan meminimalkan kesalahan dalam pengisian laporan. Di Polewali Mandar, sebagian UMKM telah mulai memanfaatkan sistem pelaporan pajak berbasis *online*, namun terdapat kendala pada aksesibilitas teknologi, terutama bagi UMKM yang berlokasi di daerah terpencil. Yulianti dan Rahmawati (2019) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam perpajakan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak, namun tetap diperlukan dukungan pelatihan bagi pengguna.

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang tinggi akan berkontribusi positif pada peningkatan pendapatan daerah, yang pada gilirannya mendukung pembangunan lokal. Menurut penelitian Prasetyo dan Santoso (2020), kepatuhan pajak UMKM menjadi salah satu sumber penting bagi pendapatan daerah dan mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Di Polewali Mandar, pendapatan daerah dari sektor UMKM menunjukkan peningkatan seiring dengan adanya program

pembinaan dari pemerintah. Namun, masih dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif untuk memastikan seluruh wajib pajak UMKM dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara berkelanjutan. Beberapa faktor utama yang mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan pajak di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan oleh Pemerintah. Upaya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka. Wardani (2022) menyebutkan bahwa sosialisasi yang baik dapat membantu wajib pajak memahami pentingnya pelaporan pajak dan tata cara pengisiannya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan. Di Polewali Mandar, kegiatan penyuluhan yang dilakukan telah memberikan kontribusi positif, meskipun penyebarannya belum merata di semua wilayah. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Proses Pelaporan Pajak. Integrasi teknologi informasi dalam pelaporan pajak telah mempermudah UMKM dalam memenuhi kewajiban mereka. Prasetyo dan Santoso (2020) menekankan bahwa penggunaan sistem pelaporan *online* membantu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas. Di Polewali Mandar, sistem berbasis *online* ini mulai diakses oleh UMKM, meskipun masih memerlukan bimbingan untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil. Pelatihan Teknis untuk Aparatur yang Mengelola Pajak UMKM. Pelatihan rutin bagi aparaturnya yang terlibat dalam pelayanan pajak meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dukungan teknis yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Nasution dan Harmani (2023) mengungkapkan bahwa aparaturnya yang kompeten dapat memberikan bantuan dan informasi yang jelas kepada UMKM, yang sangat membantu dalam proses pelaporan pajak. Pengembangan Infrastruktur Pendukung di Area Pelayanan Pajak. Infrastruktur yang memadai, seperti pusat layanan pajak dengan fasilitas lengkap, berperan penting dalam mendukung UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Yulianti dan Rahmawati (2019), fasilitas yang baik memperlancar proses pelayanan dan memungkinkan wajib pajak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan, yang berdampak positif pada kepatuhan. Lingkungan Kebijakan yang Mendukung bagi UMKM. Kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi UMKM, seperti insentif pajak atau relaksasi regulasi, juga mendorong kepatuhan. Fitriani (2021) mencatat bahwa kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan UMKM dapat memotivasi mereka untuk lebih aktif melaporkan kewajiban pajak. Di Polewali Mandar, kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik usaha kecil membantu menciptakan iklim perpajakan yang lebih kondusif.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan pajak di Kabupaten Polewali Mandar membutuhkan berbagai strategi dan dukungan yang efektif. Beberapa faktor yang berperan penting dalam mendukung kepatuhan pajak UMKM adalah sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan Edukasi Pajak yang Intensif dan Berkelanjutan. Sosialisasi dan edukasi yang rutin mengenai kewajiban pajak telah membantu UMKM untuk memahami pentingnya pelaporan pajak yang benar. Wardani (2022) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, sehingga mendukung kepatuhan. Di Polewali Mandar, sosialisasi melalui media lokal dan seminar pajak telah memberikan wawasan lebih kepada UMKM mengenai kewajiban perpajakan mereka. 2) Peningkatan Kompetensi Aparatur Pajak melalui Pelatihan Teknis. Pelatihan berkala bagi petugas pajak membantu mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada UMKM. Nasution dan Harmani (2023) mencatat bahwa pelatihan teknis yang berkelanjutan meningkatkan kemampuan aparaturnya dalam memberikan informasi yang akurat dan solusi cepat bagi permasalahan yang dihadapi wajib pajak, sehingga mendukung kepatuhan. 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pelaporan Pajak. Penggunaan teknologi informasi telah mempermudah wajib pajak dalam proses pelaporan, memungkinkan mereka untuk melakukan pengisian dan pelaporan secara mandiri. Prasetyo dan Santoso (2020) menyebutkan bahwa sistem pelaporan *online* tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Di Polewali Mandar, UMKM mulai terbiasa dengan pelaporan *online* meskipun diperlukan peningkatan dalam edukasi penggunaan sistem ini. 4) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Kemudahan Bagi UMKM. Kebijakan yang adaptif dan fleksibel, seperti insentif pajak atau program relaksasi, memberikan dukungan langsung kepada UMKM dan mendorong mereka untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Fitriani (2021) menunjukkan bahwa kebijakan yang relevan dengan kebutuhan UMKM tidak hanya membantu meringankan beban pajak tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung kepatuhan jangka panjang. 5) Dukungan Infrastruktur yang Memadai untuk Layanan

Pajak. Infrastruktur yang baik, seperti kantor pajak yang mudah diakses dan fasilitas pendukung lainnya, memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan layanan secara langsung. Yulianti dan Rahmawati (2019) menyoroti bahwa infrastruktur yang memadai dan nyaman sangat penting dalam menciptakan pengalaman layanan yang positif, yang mendorong UMKM untuk lebih patuh dalam pelaporan pajak.

Tabel 1. Faktor-Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar

Aspek dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Praktik yang Diterapkan	Dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sosialisasi dan Edukasi Pajak yang Intensif dan Berkelanjutan	Mengadakan sosialisasi melalui media local dan seminar pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang kewajiban pajak.	Meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran UMKM terhadap pentingnya pelaporan pajak yang benar, sehingga mendukung kepatuhan perpajakan (Wardani, 2022).
Peningkatan Kompetensi Aparatur Pajak melalui Pelatihan Teknis	Memberikan pelatihan teknis berkelanjutan bagi petugas pajak untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan informasi yang akurat dan solusi bagi UMKM.	Aparatur pajak lebih siap dan efisien dalam melayani UMKM, yang membuat proses pelaporan pajak lebih mudah dan meningkatkan kepatuhan UMKM. (Nasution & Harmani, 2023)
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pelaporan Pajak	Mengimplementasikan sistem pelaporan pajak berbasis online yang memungkinkan UMKM melakukan pelaporan secara mandiri.	Mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kemudahan akses bagi UMKM dalam pelaporan pajak, yang mendukung kepatuhan. (Prasetyo & Santoso, 2020).
Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Kemudahan bagi UMKM	Menyusun kebijakan pajak yang adaptif dan fleksibel, seperti pemberian insentif pajak atau program relaksasi, untuk membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak.	Mengurangi beban pajak UMKM dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan jangka panjang, sehingga UMKM lebih termotivasi untuk melaporkan pajak. (Fitriani, 2021)
Dukungan Infrastruktur yang Memadai untuk Layanan Pajak	Penyediaan kantor pajak dengan akses yang mudah dan fasilitas pendukung yang memadai untuk melayani UMKM secara langsung.	Menyediakan pengalaman layanan yang nyaman dan memudahkan UMKM dalam mendapatkan bantuan terkait pajak, yang mendorong kepatuhan mereka dalam pelaporan. (Yulianti & Rahmawati, 2019)

Sumber: Data Diolah (2024)

Penerapan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Melalui sosialisasi dan edukasi pajak yang intensif dan berkelanjutan, pemerintah daerah berhasil meningkatkan

pemahaman dan kesadaran UMKM tentang pentingnya pelaporan pajak yang benar. Kegiatan ini menciptakan kepercayaan antara petugas pajak dan wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan. Peningkatan kompetensi aparatur pajak melalui pelatihan teknis juga berkontribusi pada keberhasilan ini. Pelatihan yang berkelanjutan memberikan keterampilan yang diperlukan bagi petugas pajak untuk memberikan layanan yang lebih baik, sehingga UMKM merasa lebih didukung dan mendapatkan informasi yang akurat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pajak mempermudah proses bagi wajib pajak. Dengan sistem pelaporan *online*, UMKM dapat melaporkan pajak secara mandiri, yang tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan pemerintah yang adaptif, termasuk insentif pajak dan program relaksasi, memberikan dukungan langsung kepada UMKM dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Akhirnya, dukungan infrastruktur yang memadai, seperti kantor pajak yang mudah diakses, memastikan bahwa UMKM mendapatkan layanan yang baik dan memadai. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.

SIMPULAN

Penerapan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan hasil yang signifikan dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan pelaporan pajak. Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pajak yang intensif dan berkelanjutan, yang membantu UMKM memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepercayaan terhadap petugas pajak. Peningkatan kompetensi aparatur pajak melalui pelatihan teknis menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa petugas pajak dapat memberikan layanan yang efisien dan akurat kepada wajib pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pajak memungkinkan UMKM untuk melakukan pelaporan secara mandiri, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif pajak dan program relaksasi, juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk aksesibilitas kantor pajak, memastikan bahwa wajib pajak dapat mendapatkan layanan yang dibutuhkan dengan baik.

Peran penting faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan dampak signifikan terhadap pelaporan pajak yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting sebagai berikut: 1) Sosialisasi dan Edukasi Pajak yang Intensif dan Berkelanjutan: Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang rutin membantu UMKM memahami kewajiban pajak mereka. Keterbukaan informasi antara petugas pajak dan wajib pajak meningkatkan kepercayaan dan pemahaman, yang mendukung kepatuhan dalam pelaporan pajak. 2) Peningkatan Kompetensi Aparatur Pajak melalui Pelatihan Teknis: Pelatihan berkala bagi petugas pajak meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan layanan yang akurat dan efisien kepada UMKM. Hal ini memungkinkan petugas untuk menangani pertanyaan dan masalah yang dihadapi wajib pajak dengan lebih baik. 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pelaporan Pajak: Penggunaan teknologi informasi mempermudah proses pelaporan pajak bagi UMKM. Sistem pelaporan *online* meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga wajib pajak dapat melakukan pelaporan secara mandiri dengan lebih mudah. 4) Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Kemudahan Bagi UMKM: Kebijakan yang fleksibel dan mendukung seperti insentif pajak membantu meringankan beban UMKM, menciptakan suasana yang kondusif untuk kepatuhan pajak. Kebijakan yang tepat sasaran menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan wajib pajak. 5) Dukungan Infrastruktur yang Memadai untuk Layanan Pajak: Ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk aksesibilitas kantor pajak, memfasilitasi wajib pajak dalam mendapatkan layanan yang diperlukan. Infrastruktur yang nyaman menciptakan pengalaman positif bagi wajib pajak, mendorong mereka untuk lebih patuh dalam pelaporan pajak.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung yang diterapkan di Kabupaten Polewali Mandar memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang efektif, meningkatkan kompetensi aparatur, memanfaatkan teknologi, menerapkan kebijakan yang mendukung, dan memastikan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah dapat mendorong kepatuhan pajak UMKM secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitri, S., & Rizki, M. (2023). Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 45-60.
- Fitriani, R. (2021). Kebijakan Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Ekonomi*, 8(1), 45-59.
- Handayani, H. (2022). Pentingnya Edukasi Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 4(1), 15-30.
- Kusuma, A. (2023). Sistem Pelaporan Pajak yang Ramah UMKM: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 7(3), 100-115.
- Nasution, M., & Harmani, A. (2023). Pelatihan untuk Aparatur Pajak dalam Meningkatkan Pelayanan kepada UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 30-42.
- Prasetyo, E., & Santoso, B. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(3), 50-64.
- Prasetyo, E., & Santoso, B. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan Pajak. *Jurnal Pajak dan Administrasi*, 11(3), 120-134.
- Prasetyo, E., & Santoso, B. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Administrasi*, 11(3), 120-134.
- Sari, L., & Kurnia, D. (2021). Tantangan Kepatuhan Pajak di Sektor UMKM: Studi Kasus di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 9(3), 33-48.
- Setiawan, H., & Putra, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik*, 4(4), 34-47.
- Wardana, I. (2019). Kepatuhan Pajak UMKM: Kontribusi terhadap Penerimaan Negara dan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 12(1), 25-40.
- Wardani, S. (2022). Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan yang Efektif untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan*, 9(1), 25-39.
- Wibowo, A. (2019). Edukasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 90-104.
- Wibowo, R. (2021). Penyederhanaan Prosedur Pelaporan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 75-90.
- Yulianti, L., & Rahmawati, D. (2019). Infrastruktur Pendukung Pelayanan Pajak untuk UMKM. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 7(4), 66-79.
- Yulianti, L., & Rahmawati, D. (2019). Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak: Peluang dan Tantangan untuk UMKM. *Jurnal Manajemen Pajak*, 5(3), 58-72.
- Yulianto, B., & Pratama, R. (2020). Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak dan Hukum*, 6(4), 50-65.